

Analisis Perilaku Politik, Budaya Masyarakat dan Agama di Indonesia

Yuli Safitri¹, Anwar Efendi Pane², Elly Warnisyah Harahap³

(1) Pemikiran Politik Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

(2) Pemikiran Politik Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

(3) Pemikiran Politik Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

✉ Corresponding author

(yulisafitri961@gmail.com)

Abstrak

Indonesia adalah negara dengan memiliki berbagai macam etnis dan agama. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar, Indonesia memiliki ragam agama, budaya, dan perilaku politik yang berbeda-beda. Sistem politik di Indonesia tentunya tidak lepas dari pembenahan. Selain itu, Indonesia adalah negara yang mayoritasnya Bergama dan percaya akan nilai-nilai kemanusiaan, seperti kebebasan dan keadilan sosial. Bukan hanya perilaku politik, dan agama saja, Indonesia kaya akan budaya masyarakat yang humanisme. Maka dari itu, peneliti bertujuan untuk menganalisis perilaku politik, budaya masyarakat, dan agama di Indonesia untuk memberikan pengetahuan seputar keragaman Indonesia untuk para akademisi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka (*library research*). Hasil penelitian ini menunjukkan perilaku politik di Indonesia tidak terlepas dari agama yang mengatur moral dan perilaku seseorang. Begitu juga dengan budaya masyarakat Indonesia juga mempengaruhi perilaku politik masyarakat Indonesia. Sebab, Dengan cakupan pengetahuan kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan lainnya yang ada pada budaya masing-masing seseorang dapat menentukan pilihan politiknya.

Kata Kunci : Perilaku Politik, Budaya, Agama.

Abstract

Indonesia is a country with a wide range of ethnicities and religions. As the country with the largest population, Indonesia has a variety of religions, cultures, and different political behaviors. The political system in Indonesia is certainly not free from improvement. In addition, Indonesia is a country whose majority is religious and believes in human values, such as freedom and social justice. Not only political behavior, and religion, Indonesia is rich in the culture of a humanistic society. Therefore, the researcher aims to analyze political behavior, community culture, and religion in Indonesia to provide knowledge about Indonesia's diversity for academics. The research method used is a qualitative method with data collection techniques through library research. The results of this study show that political behavior in Indonesia is inseparable from religion which regulates morals and behavior. Likewise, the culture of Indonesian society also affects the political behavior of Indonesian society. Because, with the scope of knowledge of beliefs, arts, morals, laws, customs and others that exist in each culture a person can determine his political choices.

Keywords: Political Behavior, Culture, Religion.

PENDAHULUAN

Mempelajari politik, tidak bisa terlepas dari dinamika kehidupan manusia itu sendiri, karena antara politik dan manusia merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, mengingat manusia selalu berupa untuk mencari kehidupan yang lebih baik bahkan lebih layak, sehingga dengan tujuannya tersebut akan selalu berupaya untuk melakukan segala cara yang dapat memungkinkan tujuannya itu tercapai, termasuk dalam mendapatkan kekuasaan, dan merebut kekuasaan, hal inilah yang kemudian membentuk perilaku politik seseorang.

Perilaku politik mencerminkan cara individu atau kelompok berinteraksi dengan lingkungan politik dan membuat keputusan terkait dengan politik. Hal ini melibatkan proses pengambilan keputusan, dimana individu atau kelompok mempertimbangkan nilai-nilai, preferensi, dan informasi yang tersedia dalam situasi politik tertentu (Surbakti, 2010).

Dalam analisa politik modern perilaku politik atau partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang. Indonesia yang notabene merupakan negara berkembang misalnya telah menjamin hak-hak politik terhadap warga negaranya melalui Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 dan pasal 28. Hal ini menegaskan bahwa hak politik yang diaktualisasikan dalam bentuk perilaku politik merupakan hak dasar yang dijamin oleh negara (Hamid, 2020).

Pada konteks masyarakat yang majemuk atau heterogen seperti Indonesia, terbentuknya perilaku politik seseorang atau pun suatu kelompok tentunya hal-hal tersebut tidak dapat berdiri sendiri, ada banyak faktor yang mempengaruhi pola pikir dan perilaku politik suatu masyarakat, salah satunya adalah budaya dan agama.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar, Indonesia memiliki ragam agama, budaya, dan perilaku politik yang berbeda-beda. Terkait dengan ragam suku bangsa dan budaya di Indonesia, mengutip situs www.indonesia.go.id (2023), menurut sensus BPS pada tahun 2010, Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa, tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di nusantara. Suku Jawa adalah kelompok terbesar di Indonesia dengan jumlah yang mencapai 41% dari total populasi.

Indonesia juga disebut sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Menurut data yang dilansir dari situs www.worldpopulationreview.com (2023), negara dengan jumlah umat Muslim terbesar pada tahun 2023 adalah Indonesia dengan jumlah kurang lebih sekitar 229 juta Muslim. Disusul dengan negara Pakistan dengan 200 juta Muslim dan India dengan 195 juta Muslim.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti bertujuan untuk menganalisis lebih dalam bagaimana hubungan perilaku politik, agama, dan budaya masyarakat di Indonesia dan apa yang dihasilkan dari ketiga hubungan tersebut. Menurut beberapa jurnal serupa yang membahas mengenai budaya dan politik rata-rata hanya memberikan gambaran umum mengenai situasi budaya dan politik di Indonesia. Oleh karenanya, pada penelitian ini akan digunakan metode yang berbeda yang dengan melihat, mengamati lalu menganalisa apa saja hal yang menjadi kebergantungan budaya, politik dan agama bagi masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah riset kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruangan perpustakaan (Akil Tahir, Sultan, Syamsuddin, & Sabri, 2019). Menurut Sugiyono (2017) "Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah."

Dalam kajian ini, penulis mengadakan penelitian kepustakaan, guna memperoleh data-data dari sumber utama dan pendukung dari literatur-literatur terdahulu, naskah/ manuskrip kuno, buku-buku, skripsi, artikel baik berupa *hardcopy* atau pun dari internet yang berkaitan dengan topik pembahasan yang diteliti.

Metode penelitan ini menggunakan kualitatif deskriptif, menggambarkan proses penelitian ini bedarkan dari hasil studi pustaka berupa buku, hasil riset lembaga survey dan konsultan politik (Candramukti, 2020). Menurut (Creswell, 2007), penelitian kualitatif berupaya mengkonstruksi realitas sosial, berfokus pada proses interpretasi dan peristiwa, kunci utamanya terletak pada keaslian, tidak bebas nilai, terikat pada fenomena dan situasi yang diamati, bersifat analisis tematik serta melibatkan peneliti di dalamnya (Sari, 2020).

Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mencari pengetahuan atau pemahaman berbagai relasi terkait perilaku politik, budaya dan agama. Melalui studi teks dan dokumentasi berita serta artikel yang telah dibaca oleh peneliti secara berulang ulang sehingga peneliti dapat membuat sebuah analisis dan deskripsi (Tahir dkk, 2020).

PEMBAHASAN

Budaya dan Perilaku Politik

Setiap individu hidup di lingkungan kebudayaannya, masing-masing budaya punya ciri khasnya tersendiri. Kebudayaan orang Madura akan berbeda dengan budaya Makassar, budaya orang Jawa berbeda dengan budaya orang Bali, demikian juga budaya orang Irian akan berbeda dengan kebudayaan orang Batak. Sekalipun demikian, kebudayaan itu bisa dipelajari, dibentuk dan dirubah. Kebudayaan dengan berbagai macam bentuk dan jenisnya itu, selalu diturunkan dan diajarkan oleh generasi tua kepada generasi muda, bisa melalui pendidikan (baik pendidikan formal, informal maupun non formal), atau melalui kesenian (tarian, lukisan, gambar hidup atau patung, cerita, nyanyian, sandiwara, dan lain-lain), bisa pula lewat ajaran leluhur, lewat pameran secara seremonial, adat istiadat, tradisi, dan lain-lain. Dengan cara demikian baik disadari atau tidak disadari, kebudayaan telah menanamkan garis pengarah terhadap sikap dan perilaku kepada masyarakatnya dalam berbagai aspek kebudayaan itu sendiri.

Perilaku masyarakat termasuk di dalamnya perilaku politik dengan sendirinya berkembang di dalam dan dipengaruhi oleh kompleksitas nilai-nilai budaya yang ada di dalam masyarakat tersebut. Pengaruh ini dapat dilihat dari penerapan nilai-nilai tradisi dalam sistem kebudayaan tersebut yang dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat, terutama didalam struktur masyarakat yang semua anggotanya tercakup di dalam kekuatan sosial yang sama dimana komunitas atau masyarakat tersebut memiliki persatuan dan kesatuan solidaritas mekanis. Dalam kondisi masyarakat yang demikian kesadaran individu dalam berperilaku lebih didasarkan kepada nilai-nilai kelompok dan kedekatan emosi dibandingkan pada pertimbangan yang rasional sehingga mengaburkan kadar kritisisme pada masing-masing individu atau masyarakat. Akibatnya kelompok sosial tertentu secara efektif dapat mempengaruhi mereka untuk menyerahkan diri dalam kekuasaannya.

Kaburnya kadar kritisisme masyarakat akibat perilaku yang lebih mengedepankan kedekatan emosi terhadap nilai-nilai budaya lokal tentunya akan mereduksi semangat otonomi daerah dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsungnya sebagai masa depan pengembangan kehidupan demokrasi. Akibatnya nilai-nilai budaya lokal yang sebenarnya konstruktif terhadap perkembangan demokrasi lokal, justru akan dianggap sebagai parasit yang menghambat perilaku politik yang di dasarkan pada nilai-nilai objektif. Penyelenggaraan pemilu sebagai wujud pengembangan demokrasi memberikan gambaran bagaimana jarak emosi antara nilai-nilai budaya dengan massa pemilih yang sangat dekat memainkan peranan yang cukup signifikan dalam mempengaruhi perilaku dan pilihan masyarakat (Romadhan, 2011).

Rasa fanatisme berlebihan terhadap nilai-nilai budaya yang didukung dengan minimnya pengetahuan masyarakat terhadap peranannya dalam sistem budaya dan sistem politik, mengaburkan batasan peranan mereka terhadap keseluruhan sistem tersebut. Bahkan terlebih-lebih jika kebudayaan tersebut mendapatkan pembenaran agama, maka akan memberikan pengaruh yang besar dalam proses penyerapan dan pembentukan pandangan masyarakat tentang kekuasaan, atau simbol-simbol yang ada disekitarnya (Romadhan, 2011).

Kecenderungan munculnya tingkat fanatisme yang berlebihan terhadap nilai-nilai budaya lokal, melahirkan pola hubungan kepatuhan subyektif terhadap dominasi minoritas kelompok yang mendapatkan legitimasi untuk melanggengkan tata aturan sosial dalam masyarakat tersebut dan dalam kondisi tertentu cenderung melahirkan kultur paternalisme, dimana *patron* (tokoh panutan) diposisikan sebagai orang tua yang harus ditaati dan dihormati oleh masyarakat (Alfian, 2009).

Sikap dan tingkah laku mereka (*klien*) sedikit banyak akan ditentukan oleh pola hubungan emosional dengan patron berdasarkan tali ikatan suku, tradisi dan agama. Akibatnya mereka (*klien*) akan kehilangan rasionalitasnya dalam menentukan pilihan, pertimbangan rasional menjadi nihil dan tereduksi oleh munculnya faktor-faktor emosional. Keadaan ini dengan sendirinya cenderung menimbulkan adanya potensi-potensi mobilisasi pemilih yang hanya dilegitimasi oleh sebagian elit politik atau kelompok tertentu saja. Upaya tokoh panutan (*patron*) untuk mengarahkan/ memobilisasi massa untuk mempengaruhi masyarakat terhadap pilihan-pilihan mereka kepada calon-calon tertentu ini hampir mewarnai dalam setiap pelaksanaan pemilu (Rifa'i, 2005).

Fakta ini tentunya telah menggambarkan bagaimana nilai-nilai budaya lokal memiliki pengaruh yang belum konstruktif terhadap perilaku politik masyarakat dalam partisipasi politiknya. Dalam literatur politik tanah air, mencatat, bagaimana budaya memainkan perannya yang sangat besar dalam kancah politik di Indonesia. Budaya telah membentuk opini dan perilaku politik masyarakat bahwa selain suku Jawa maka tidak akan bisa menjadi Presiden Republik Indonesia.

Suku Jawa sangat kental dengan masalah tradisi dan budaya, hal ini masih mendominasi sebagai budaya dan tradisi nasional di Indonesia. Banyaknya orang Jawa menjadi elite negara di Indonesia sejak zaman sebelum dan sesudah kemerdekaan. Nama Jawa sangat akrab di telinga masyarakat Indonesia begitu pun dengan istilah-istilah Jawa, hal ini yang membuktikan bahwa tradisi dan budaya Jawa cukup memberi warna dalam berbagai permasalahan bangsa dan negara di Indonesia. Suku Jawa tersebar hampir diseluruh Indonesia dengan populasi terbesar ada di Provinsi Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur serta di Sumatera juga tidak sedikit yang bersuku Jawa, jumlah tersebut menjadikan suku Jawa sebagai suku mayoritas di Indonesia yang memiliki rasa kekeluargaan dan kekerabatan yang relatif tinggi (Hartati, 2021).

Interaksi antar warga dan rasa kekeluargaan yang relatif tinggi tentunya mempengaruhi perilaku politik masyarakat suku Jawa, sehingga perilaku politik masyarakat menimbulkan sikap primordialisme. Oleh karena itu banyak asumsi yang mengatakan bahwa masyarakat yang bersuku Jawa sangat sulit dan enggan dalam memilih pemimpin yang bukan suku Jawa dan hal tersebut turut mempengaruhi perilaku politik masyarakat. Dengan demikian dapat dinyatakan, budaya politik mempengaruhi perilaku politik dan menentukan keputusan nasional yang menyangkut pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat, budaya juga terdiri dari serangkaian keyakinan, simbol-simbol dan nilai-nilai yang melatarbelakangi situasi dimana suatu peristiwa politik terjadi (Chilcote, 2003).

Agama dan Perilaku Politik

Manusia dan agama merupakan pasangan yang senantiasa mewarnai kehidupan. Agama merupakan bagian kehidupan manusia. Corak dan warna kehidupan seseorang akan dipengaruhi oleh agamanya. Kenyataan ini menjadikan manusia disebut "*homo religius*". Pada saat agama mempengaruhi kehidupan seseorang, di saat yang sama corak pemikiran dan pemahaman keagamaan seseorang akan pula berimplikasi terhadap kehidupannya. Dalam perkembangannya, yang kemudian ikut membentuk sikap dan perilaku seseorang, adalah corak dan pemahaman keagamaan. Politik, sebagai bagian dari perilaku manusia, adalah di antara bagian yang terkena konsekuensinya. Corak pengetahuan, pemikiran dan pemahaman keagamaan seseorang dalam batas tertentu mempengaruhi perilaku politiknya. Signifikansi corak pemikiran dan pemahaman keagamaan terlihat antara lain dalam afiliasi dan saluran politik seseorang.

Menurut Smith ada tiga hal pokok dalam agama yang secara psikologis menentukan pembentukan sikap dan perilaku politik: (1) otoritas *dogmatis*, atau kebenaran yang bersifat mutlak; (2) otoritas *terarah*, atau ketuntasan pengaturan; dan (3) *pelembagaan otoritas*, atau pemaduan pemahaman dan penggunaan kebenaran mutlak dalam perumusan aturan yang memperkuat struktur keagamaan. Otoritas *dogmatis* dalam Islam sangat kuat. Kebenaran Islam diyakini mutlak, universal dan tidak dapat diubah. Wahyu al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw adalah wahyu terakhir untuk menuntun kepentingan hidup seluruh umat manusia. Otoritas *terarah*, yang merupakan seperangkat aturan komprehensif yang harus ditaati oleh umat Islam, terdapat dalam syariah. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa syariah lebih luas daripada sekedar sistem hukum. Ia merupakan katalog komprehensif perintah-perintah dan aturan-aturan Allah untuk membimbing umat Islam. Cakupan syariah begitu luas yang meliputi hubungan antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan masyarakatnya (Sudrajat, 2002).

Pelembagaan otoritas adalah adanya hirarki kepemimpinan yang terorganisasi dalam Islam yang akan mengawal pelaksanaan dan berlakunya syariah. Dalam Islam, organisasi hirarkial keagamaan seperti yang dimiliki gereja tidak ada, oleh karena itu kelembagaan seperti ini diserahkan kepada umat atau negara. Dalam hal inilah kemudian muncul jargon politik yang dikemukakan oleh sejumlah gerakan Islam bahwa Islam adalah *din wa al-daulah*. Islam merupakan sistem keberadaan yang total, yang secara universal sesuai dengan semua keadaan, waktu dan tempat. Syariah Islam bersifat inheren, al-Quran memberikan syariah dan negara memperkuatnya. Pemisahan antara agama dan negara tidak dapat diterima. Atau dalam pernyataan lain corak kehidupan yang sekuleristik, yang meminggirkan agama dari pentas kehidupan manusia, tidak bisa diterima (Sudrajat, 2002).

Sejatinya, pelibatan agama dalam politik dimaksudkan agar politik sesuai dengan etika dan ajaran agama, terutama ketika kondisi etika-moral politik pada saat ini secara umum masih sangat lemah, baik dalam persaingan untuk memperoleh kekuasaan maupun dalam penggunaan kekuasaan. Problem etika moral ini misalnya dapat dilihat dari masih banyaknya kebohongan publik, korupsi, manipulasi, egoisme, kebencian, penyalahgunaan wewenang, dan sebagainya. Bagi warga yang memiliki orientasi keagamaan yang tinggi, segala perilaku, budaya, serta sistem hukum dan politik sedapat mungkin sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Dalam konteks ini agama menjadi alat legitimasi bagi perilaku dan orientasi politik seseorang. Oleh karenanya, aspirasi politik mereka tidak hanya didasarkan atas pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, tetapi juga pemenuhan kebutuhan spiritual (keagamaan).

Pelibatan agama dalam politik oleh penganutnya dimaksudkan untuk: (1) mengawal agar politik sesuai dengan etika dan ajaran agama, (2) melegitimasi aspirasi dan perilaku politik dengan ajaran agama, dan (3) membangun identitas dan solidaritas sosial. Karena di sebagian besar negara di dunia, agama tidak bisa dipisahkan sepenuhnya dari negara, maka agama pun tidak bisa dipisahkan sepenuhnya dari politik dan sebaliknya. Pelibatan agama dalam politik tidak bertentangan dengan demokrasi, dan hal ini pun terjadi di negara-negara Barat yang notebene sekuler (Abdillah, 2018).

Hampir semua negara mayoritas berpenduduk Kristen terdapat partai-partai Kristen, seperti di Argentina, Australia, Belgia, Belanda, Brazil, Inggris, Italia, Jerman, Norwegia, dan sebagainya. Bahkan partai Kristen juga terdapat di Perancis dan Amerika Serikat, meski di kedua negara ini partai agama tidak berkembang, yakni *Christian Democratic Party* (*Parti chrétien-démocrate*, PCD) yang didirikan pada 2001, dan *American Solidarity Party* (ASP) yang didirikan pada 2011. Di sejumlah negara berpenduduk mayoritas Islam juga terdapat partai-partai agama, seperti di Aljazair, Indonesia, Malaysia, Mesir, Pakistan, Tunisia, dan sebagainya. Di negara-negara mayoritas Hindu juga terdapat partai Hindu, dan di sebagian besar negara mayoritas Buddha juga terdapat partai Buddha (Abdillah, 2018).

Hanya saja, dalam beberapa tahun terakhir ini terjadi fenomena di dunia, bahwa fungsi ketiga tersebut, yakni membangun identitas dan solidaritas sosial secara sempit, sangat menonjol untuk mendapatkan kekuasaan, yang terintegrasi dengan politik identitas dan populisme. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di luar Indonesia, termasuk negara-negara demokratis sekuler. Pelibatan agama dalam politik yang demikian ini kemudian disebut sebagai politisasi agama yang berkonotasi negatif dan dinilai tidak sejalan dengan etika demokrasi. Disinilah pada akhirnya, agama dianggap memiliki peran ganda dalam politik.

Politisasi agama dalam dua dasawarsa terakhir ini semakin kuat, sebagai cara cepat untuk mendapatkan dukungan lebih besar dari publik, baik karena dalam kompetisi politik maupun alasan legitimasi faham keagamaan suatu kelompok. Partai Keadilan dan Kebebasan (*Hizb al-'Adalah wa al-Hurriyah*) dan Partai al-Nour (*Hizb al-Nūr*) di Mesir, misalnya, dapat memenangkan pemilihan umum tahun 2013 di Mesir setelah terjadi Arab Spring pada 2012 terutama karena faktor politisasi agama ini. Politisasi agama juga terjadi di negara-negara Barat sekuler yang dalam banyak kasus terintegrasi dengan politik identitas dan populisme, dan bahkan Islamofobia. Di Amerika Serikat, agama juga dijadikan sebagai alat legitimasi dan bahkan politisasi dalam pemilu, terutama untuk menarik dukungan dari kelompok-kelompok konservatif dan fundamentalis. Kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden Amerika Serikat pada 2016 lalu tidak terlepas dari politisasi agama dalam kampanyenya, terutama politik anti-Islam (Islamofobia) dan anti-imigran.

Demikian pula, penambahan suara atau kemenangan pendukung partai-partai kanan di Eropa Barat dalam pemilihan umum juga tidak terlepas dari politisasi agama. Partai-partai sayap kanan itu antara lain: *National Front Party* di Perancis dengan tokohnya Marine Le Pen, *The Party for Freedom* di Belanda dengan tokohnya Geert Wilders, dan *Danish People's Party* dengan tokohnya Pia Kjaersgaard. Austria adalah negara yang saat ini pemerintahannya dikuasai oleh partai sayap kanan, yakni *Austrian People's Party* dengan tokohnya Sebastian Kurz. Penggunaan isu-isu agama (politisasi agama) dalam pemilihan di Indonesia juga terjadi di Indonesia, terutama pada masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019 dan juga pada Pilkada DKI 2016.

Untuk melakukan pencegahan politisasi agama diperlukan upaya-upaya pelurusan pengertian dan batasan pelibatan agama dalam politik serta pelurusan pemahaman keagamaan yang dipergunakan untuk politisasi agama. Dalam hal ini, ungkapan bahwa agama harus lepas sama sekali dengan politik tentu saja kurang tepat, karena Indonesia adalah negara Pancasila, yang sangat menghormati kedudukan agama. Agama bahkan sering dilibatkan dalam legitimasi politik untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut di atas. Namun, pelibatan agama dalam politik ini perlu diekspresikan dengan santun dan tidak mencampuradukkan antara kepentingan politik praktis dan agama, sehingga pelibatan agama ini tidak menimbulkan perpecahan, kebencian dan konflik SARA.

Disamping itu, diperlukan pula kesadaran semua pihak, terutama tokoh politik, tokoh organisasi keagamaan dan tokoh agama, akan pentingnya selalu menjaga persatuan bangsa, dan bahwa politisasi agama akan merendahkan posisi agama hanya sebagai alat memperoleh kekuasaan. Dalam konteks ini, ajaran Islam sebenarnya sudah jelas menyatakan keharusan berbuat adil termasuk terhadap kelompok yang tidak disukai (Q.S. al-Maidah: 8), larangan komersialisasi atau manipulasi ayat al-Quran (Q.S. al-Baqarah: 41), larangan fitnah dan adu domba (Q.S. al-Qalam: 10-11 dan Q.S. al-Lumazah: 1), dan larangan mengolok-olok atau membenci kelompok lain (Q.S. al-Hujurat: 11 dan al-An'am: 108) (Abdillah, 2018).

SIMPULAN

Perilaku politik di Indonesia tidak terlepas dari agama yang mengatur moral dan perilaku seseorang. Begitu juga dengan budaya masyarakat Indonesia juga mempengaruhi perilaku politik masyarakat Indonesia. Sebab, Dengan cakupan pengetahuan kepercayaan (agama), kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan lainnya yang ada pada budaya masing-masing seseorang dapat menentukan pilihan politiknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. (2020). Mendialogkan Nalar Agama dan Sains Modern di Tengah Pandemi Covid-19. *Maarif* 15.1, 11-29.
- Angkat, I. (2021). Budaya Politik Emha Ainun Nadjib dalam Meretas Problematika Pluralitas Agama di Indonesia. *Hikmah* 18.1, 13-27.
- Halim, A. (2021). Padangan Muhammad Said Al-Asymawi Tentang Relasi Agama Dan Politik. *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial* 8.1, 109-129.
- Hamdi, S. (2018). Integrasi budaya, pendidikan, dan politik dalam dakwah Nahdlatul Wathan (NW) di Lombok: Kajian biografi TGH. Zainuddin Abdul Madjid. *Jurnal Sosiologi Walisongo* 2.2, 102-122.
- Nurhuda, R. (2022). Pengaruh Sosial Politik dan Budaya Terhadap Produk Hukum Keluarga di Malaysia. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 4.1, 86.
- Nurjaman, A. (2021). Tantangan primordialisme dalam upaya membangun budaya politik nasional. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial* 5.2, 367-380.
- Qibtiyah, M. (2019). Tingkah Laku Ekonomi-Politik dalam Hegemoni Agama dan Budaya. *Jurnal Studi Sosial dan Politik* 3.1, 55-68.
- Saryono, S. (2022). Hubungan Antara Pemahaman Etika Politik dan Kesadaran Hukum Dengan Budaya Politik Organisasi Mahasiswa. *Jurnal Citizenship Virtues* 2.1, 215-222.
- Widodo, P. a. (2019). Moderasi Agama Dan Pemahaman Radikalisme Di Indonesia. *PASCA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 15.2, 9-14.

- Yunus, Y. (2020). Sosial-Budaya: Harmonisasi Agama dan Budaya dalam Pendidikan Toleransi. *Kalam: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora* 8.2, 1-26.
- Abdillah, Masykuri. (2018). *Membendung Politisasi Agama*. dikutip dari <https://graduate.uinjkt.ac.id/?p=19353> diakses pada 25 Agustus 2023.
- Alfian, M. Alfian. (2009). *Menjadi Pemimpin Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Candramukti, Febrihada Gahas. (2020). Peranan Agama Dalam Menyikapi Konflik Komunal pada Pilpres 2019. *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(2), 245-256.
- Chilcote, Ronald. (2003). *Teori Perbandingan Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Creswell, John W. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approaches*. California: Sage Publication Inc
- Edward Trias Pahlevi, D. E. (2020). Politik Jalanan: Fenomena Perilaku Politik Gerakan Pemuda Ka'bah Kota Yogyakarta Di Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 134- 148.
- Hamid, Ihsan. (2020). *Perilaku Politik: Dialektika Teoritis-Empiris Untuk Penguatan Demokrasi di Era Post Truth*. Mataram: Sanabil.
- Hartati, Riana. (2021). Perilaku Politik Budaya Jawa dalam Warga Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur. *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization*, Vol. 2 No.1, Januari 2021 (15-24).
- Maimun,. A. (2021). Perilaku Politik Masyarakat Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (Suatu Penelitian Di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar). *Jurnal Hurriah: Jurnal Evaluasi Pendidikan Dan Penelitian*, 1-15.
- Pureklolon, T. (2020). *Perilaku Politik*. Jakarta: Yayasan Pustakaobor Indonesia.
- Rifa'i, Achmadur. 2005. *Government*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Jurusan Ilmu Pemerintahan: Malang.
- Romadhan, Ach Apriyanto. (2011) *Budaya Dan Perilaku Politik(Pengaruh Figur Bhuppa', Bhabhu', Ghuru dan Rato Terhadap Perilaku Memilih Masyarakat Pada Pilkada tahun 2008 di Kabupaten Pamekasan)*. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.
- Sari, Genny Gustina. (2020). Hiperealitas Media Pada Pemilihan Umum Indonesia Tahun 2019. *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(1), 84-94.
- Sudrajat, Ajat. (2002). *Agama dan Politik*. *Jurnal Humanika I*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Tahir, Akil, Sultan, Lamba, Syamsuddin, Darussalam, & Sabri, Moh. (2019). Direct Election System In City of Makassar In Islamic Law Perspective. *Journal of Research and Multidisciplinary*, 2(1), 71-83.
- Tahir, Rahman, Kusmanto, Heri, & Amin, Muryanto. (2020). Propaganda Politik Hoaks dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019. *Jurnal PERSPEKTIF*, 9(2), 236-251.
- Tan, P. (2021). Post-Sekularisme, Demokrasi, Dan Peran Publik Agama. *Jurnal Ledalero*, 35-50.
www.indonesia.go.id
www.worldpopulationreview.com